

Hak Bahasa Studi Kasus Bahasa Waropen

Oleh
Darsita Suparno
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
darsitasuparno@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengungkapan hak bahasa dalam proposisi pada teks sastra lisan Waropen. Penelitian ini merupakan penelitian linguistik interdisiplin yang memanfaatkan ilmu sosiologi dan hukum. Analisis penelitian ini dilakukan terhadap tradisi lisan yang dituturkan oleh kelompok etnis Waropen. Teori yang digunakan untuk menganalisis proposisi hak bahasa dalam wacana tradisi lisan adalah menggunakan teori relasi antarproposisi dari Larson (1984). Analisis klasifikasi prinsip hak bahasa digunakan teori hak bahasa dari De Varennes (2001). Hasil penelitian menemukan tiga prinsip hak bahasa yang muncul dalam gugus proposisi dalam sastra lisan Waropen. Melalui analisis hubungan perbandingan dan hubungan logis ditemukan proposisi induk dan proposisi penjelas yang mengungkapkan prinsip kesemestaan, pemertabatan manusia sebagai pengguna bahasa, saling ketegantungan atau saling kontak dengan bahasa lain. Kesesuaian komponen makna dari inti proposisi utama dan komponen makna semantik membuktikan ada ungkapan kesemestaan, pemertabatan manusia, dalam proposisi yang dituturkan oleh kelompok etnis Waropen dalam sastra lisannya.

Keywords: kesemestaan, pemertabatan manusia, hak bahasa, proposisi

Abstract

This study analyzed the language right in proposition of oral tradition text which is told by Waropen ethnic group. This research is an interdisciplinary study between linguistics, sociology, and law. the analysis was conducted to the study the oral tradition told by Waropen ethnic group. The theory that is used to analyze the relation of proposition in oral tradition is interproposition theory by Larson (1984). Classification analysis used the theory language right principal by De Varennes (2001). The results of this study found three princips of language right which appears in clusters on an oral tradition proposition. Through analysis of the comparation and logic interproposition relationship found that the main proposition of the groups revealed the universality, human dignity, interdependency. Compalience of semantic component of core proposition and semantic component of the language right expression in the proposition in the oral tradition of Waropen ethnic group.

Keywords: universality, human dignity, language right, proposition

A. Pendahuluan

Masyarakat Kabupaten Yapen Waropen menggunakan bahasa Waropen. Bahasa ini digunakan oleh suku Waropen yang bermukim di bagian pantai, mulai dari daerah Ambuni atau Wandamen sampai Sosora atau Waropen Atas.¹ Bahasa Waropen hidup berdampingan dengan bahasa Saponi dan Demisa yang dipergunakan oleh suku bangsa yang tempat pemukiman mereka di pedalaman. Selain ada bahasa Waropen, Saponi dan Demisa di kawasan itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk komunikasi yang bersifat umum.²

Mencermanti situasi kebahasaan yang digambarkan oleh Mawene (1999) itu, dapat dikemukakan bahwa masyarakat kabupaten Yapen Waropen adalah masyarakat plural yang multilingual. Hadirnya bahasa Indonesia, Waropen, Saponi dan Demisa menunjukkan keragaman bahasa-bahasa yang dipakai oleh kelompok-kelompok penduduknya, itu dapat mengindikasikan keragaman suku bangsa. Fought (2006) menjelaskan etnisitas merujuk kepada identitas kelompok yang berasal dari keterikatan pemakaian bahasa yang sama, kelompok ras, atau agama yang sama.³ Pendapat Fought (2006) dapat dipakai untuk melihat realitas penutur yang bermukim di Kabupaten Yapen Waropen. Penutur bahasa di wilayah itu mengidentifikasi diri sebagai kelompok etnis Waropen yang menggunakan bahasa Waropen, sedangkan sebagian kecil penduduk Botawa menggunakan bahasa Saponi, Demisa. Mawene (1999) mengemukakan bahwa baik bahasa Saponi dan Demisa merupakan bahasa pedalaman.⁴ Kelompok etnis Waropen memiliki cerita lisan yang digagas, disimpan kemudian diturunkan secara turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Waropen cerita lisan dipandang sebagai nasehat yang diperuntukkan bagi warga masyarakat itu. Cerita lisan itu memiliki konten cerita yang menggambarkan hak-hak asasi bahasa, keteladanan, kearifan, kebaikan, nasehat, ajaran, informasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cerita lisan Waropen sering dipakai sebagai alat komunikasi sosial. Selain memiliki isi cerita, cerita lisan itu juga mengandung konten budaya dalam kehidupan manusia yang memperlihatkan adanya aspek-aspek ajaran, kesemestaan, pemartabatan manusia, etika, filsafat, sejarah, estetika, sosial, adat istiadat, norma, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam konteks cerita lisan Waropen⁵ secara tekstual kata-kata yang dituturkan atau digunakan dalam bentuk tulisan, yang sudah dicatat lalu ditranskripsi oleh Mawene memperlihatkan bentuk frase atau kelompok kata, klausa dan kalimat. Untaian kata dalam setiap cerita itu mengandung pesan-pesan yang mempunyai

¹ Mawene, Aleda, Dharmojo, Yemi Septiarti, dan Edison Saroi. *Struktur Sastra Lisan Waropen*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 11

² *Ibid.*

³ Fought, Carmen. *Language and Ethnicity*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal 25

⁴ *Op.cit.* Mawene., (1999), hal 12.

⁵ *Ibid.*, Mawene., kumpulan cerita lisan yang terdapat di dalam Struktur Cerita Lisan Waropen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aleda Mawene digunakan sebagai sumber rujukan cerita.

keterkaitan dengan hak asasi manusia, hak berbahasa, tentang manusia, tindakan, keyakinan, perasaan, lingkungan alam dengan segala fenomenanya. Pesan-pesan itu bersifat simbolik yang berhubungan dengan kategori hak bahasa yang memiliki prinsip seperti kesemestaan (*universality*) yang merujuk kepada nilai etik, dan moral, pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*), persamaan dan menghormati hak orang lain. Kenyataan seperti tertera di atas, pertanyaan yang dapat diajukan: bagaimana proposisi yang terkait dengan hak bahasa atau hak berbahasa melalui hubungan proposisi dalam suatu percakapan? Prinsip hak-hak asasi apa saja yang ditampilkan oleh proposisi yang ditampilkan oleh para tokoh cerita?

Artikel ini akan mencari tahu proposisi yang terkait dengan hak asasi bahasa melalui hubungan proposisi dalam percakapan cerita lisan; mencari tahu prinsip hak asasi yang ditampilkan oleh proposisi-proposisi yang diujarkan oleh tokoh-tokoh cerita lisan berbahasa Waropen yang dipergunakan di Kabupaten Yapen Waropen.

B. Pembahasan

Proposisi merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Proposisi ditinjau dari tataran semantik memiliki hubungan erat dengan filsafat logika dan linguistik teoretis. Filsafat logika merupakan ihwal munculnya berbagai hal misalnya menyangkut proposisi secara konseptual. Cara pandang filsafat ini mengatakan bahwa manusia hidup menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Lyons (1999) berpendapat bahwa studi linguistik teoretis khususnya semantik memiliki banyak objek kajian, salah satunya menganalisis proposisi, dan keterkaitan antar proposisi. Satuan bahasa merupakan unsur yang terkait satu sama lain yang bersifat hierarkis yang digambarkan sebagai berikut: *sentences, clauses, statements, and propositions*.⁶ Konsepsi ini menjelaskan bahwa keberadaan proposisi selalu hadir di dalam kalimat (*sentences*), klausa (*clauses*), dan pernyataan (*statements*). Berangkat dari penjelasan itu, keberadaan proposisi dapat dijelaskan dalam studi semantik sebagai sebuah bahasa alamiah yang kerap atau biasa digunakan manusia, sehingga bahasa ini dapat dibuktikan atau dipaparkan.

Lebih lanjut, Lyons (1999) berpendapat bahwa ada lima parameter yang dapat dipakai untuk mengkaji satu proposisi, yaitu: 1) proposisi dapat bersifat benar atau salah; 2) suatu proposisi berisi nilai kebenaran (*truth values*); 3) proposisi dapat berwujud objek dari suatu sikap proposisional (*propositional attitude*); 4) proposisi dapat berbentuk objek dari tindakan ilokusi sehingga dapat ditambahkan, dinyatakan, disangkal; 5) proposisi seringkali hadir dan keberadaannya mapan dalam sebuah

⁶ Lyons, John. "Sentences, Clauses, Statements, Propositions". In Peter Collins and David Lee. (ed). *The Clause in English*. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1999), 157-158 pp

terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Kelima parameter tersebut dipahami sebagai aspek-aspek yang melekat dalam setiap satu proposisi.⁷

Berbeda dengan Lyons (1999) mengenai proposisi yang memiliki lima parameter, van Dijk (1980) berpendapat bahwa proposisi memiliki kaitan erat dengan makna. Proposisi yang satu dengan proposisi yang lain saling berkaitan. Relasi antarproposisi berfungsi menimbulkan makna semantik yang ada dalam suatu wacana. Makna yang muncul akibat hubungan antarproposisi itu, adalah: 1) suatu makna dapat muncul akibat dari proposisi-proposisi yang saling berelasi; 2) suatu makna dapat muncul akibat dari pemahaman sebuah teks secara utuh. Atas dasar penjelasan itu, dipahami bahwa relasi antarproposisi dapat berfungsi sebagai pembentuk makna. Ditinjau dari segi pembentuk makna, relasi antarproposisi dapat membentuk: 1) makna bersifat holistik; 2) munculnya sebuah proposisi baru yang disebut proposisi makro.⁸ Bertumpu pada penjelasan di atas, sebuah cerita lisan milik warga Waropen itu, dalam kajian ini dianggap sebagai sebuah wacana di dalamnya banyak kandungan proposisi yang memiliki satuan makna terkecil.

Kajian ini memfokuskan diri pada proposisi sebagai objek kajian. Proposisi dilihat sebagai satuan bahasa yang memiliki makna yang saling berelasi antar satu satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Setiap proposisi yang unsur-unsurnya terkait itu diasumsikan membentuk sebuah wacana. Setiap wacana mengandung proposisi yang satu berhubungan dengan proposisi yang lain untuk mengusung satu pokok persoalan yang sama (*the same topic*).⁹ Renkema (2004) berpendapat bahwa dalam konteks kajian wacana, pokok permasalahan (*aboutness*) atau pokok pembicaraan atau topik merupakan objek utama.¹⁰ Dijelaskan lebih rinci, pokok pembicaraan dapat merujuk kepada beberapa dimensi, seperti: 1) pokok persoalan dalam sebuah wacana; 2) gagasan utama atau persoalan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf; 3) gagasan utama dalam sebuah kalimat. Larson (1984) menjelaskan bahwa proposisi tidak dapat berdiri sendiri, artinya setiap proposisi memiliki kaitan dengan proposisi lain. Konsepsi ini digunakan sebagai dasar berpikir dalam melakukan analisis hubungan antar proposisi dalam cerita lisan Waropen yang menjadi objek sasaran dalam kajian ini.

Bertumpu kepada pemahaman tentang pokok persoalan atau *aboutness* itu, kajian ini memfokuskan diri pada konsep pokok persoalan dalam sebuah atau beberapa wacana cerita lisan. Cerita lisan yang digunakan oleh warga Waropen itu dibedah untuk menemukan gugus proposisi-gugus proposisi yang mengandung gambaran hak asasi bahasa atau hak asasi berbahasa. Patten (2013) berpendapat bahwa hak asasi berbahasa

⁷ *Ibid.*

⁸ Van Dijk, Teun. *Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structure in Discourse Interactions and Cognition*. (New Jersey: Laurence Erlbaum Associates Publishers, 1980), 148p

⁹ Renkema, Jan. *Introduction to Discourse Studies*. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004), 88-90 pp.

¹⁰ Larson, Mildred. *Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman untuk Pemaanaran Antarbahasa* Terjemahan Kencanawati Tamiran. Jakarta: Arcan, 1984) hal 197-198.

(*language rights*) merujuk kepada kondisi, situasi, aturan-aturan penggunaan bahasa dalam berbagai ranah.¹¹

Hubungan antarproposisi dipandang sebagai salah satu alat analisis yang cocok, untuk menemukan hubungan antarproposisi yang terdapat dalam cerita lisan milik warga Waropen. Alasannya hubungan antarproposisi itu merupakan unsur yang membangun pokok persoalan setiap topik itu. Rasionalisasi yang mengarah kepada analisis hubungan antarproposisi diharapkan terungkap proposisi-proposisi yang terkait dengan hak bahasa atau hak berbahasa, dengan dasar pemahaman bahwa proposisi memiliki kaitan erat dengan teks. Pandangan terhadap proposisi diarahkan kepada makna proposisi dalam arti luas, yakni proposisi yang bermakna: 1) suatu keadaan atau kejadian; 2) beberapa aspek yang mempunyai hubungan langsung dengan kejadian atau keadaan. Konsep proposisi yang dikemukakan oleh Larson (1984) yang dirujuk untuk menganalisis proposisi cerita lisan ini adalah proposisi semantik yang mengarahkan analisis yang bersifat hierarkis ditinjau dari tataran gramatikal. Tataran gramatikal itu mencakupi: 1) klausa; dan 2) kalimat tunggal.¹²

Dalam konteks kajian ini, proposisi dipahami pula sebagai satuan semantik yang mengandung konsep-konsep, yaitu bila sebuah proposisi yang satu merupakan konsep penjelas, maka proposisi yang lainnya dianggap sebagai konsep inti. Sistem keterkaitan antarproposisi dijelaskan oleh Larson (1984) itu mengacu kepada sebuah proposisi yang dapat menjadi inti proposisi dan inti proposisi itu dapat bergabung dengan konsep lain. Proposisi sebagai satuan semantik, dapat dirinci ke dalam dua fitur, yaitu: 1) benda dan 2) kejadian. Satu proposisi dapat disebut sebagai proposisi benda jika konsep itu merujuk kepada benda. selanjutnya, sebuah proposisi dapat diidentifikasi sebagai suatu kejadian bila konsep itu merujuk kepada kejadian.¹³ Sebuah teks proposisi di dalam cerita lisan Waropen dapat dianggap sebagai kumpulan proposisi. Proposisi dalam sebuah teks cerita dianggap sebagai sebuah wacana, yang di dalam wacana itu terdapat gugus-gugus proposisi. Setiap gugus proposisi itu membentuk paragraf semantik. Setiap paragraf itu membentuk episode dalam suatu percakapan yang membentuk gugus episode. Setiap gugus episode membentuk satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian itu menyatu membentuk wacana bermakna. Berdasarkan kepada konsepsi itu, Larson menggolongkan proposisi dalam dua hubungan yaitu : 1) hubungan penjelasan; 2) hubungan logis. Uraian tiap-tiap hubungan tersebut adalah:

1. Hubungan Penjelasan

¹¹ Patten and Will Kymlicka. "Introduction: Language Right and Political Theory: Contexts Issues and Approaches", in Will Kymlicka and Allan Patten (eds.), *Language Right and Political Theory*. (Oxford: Oxford University Press, 2003), 1-51pp

¹² *Op.cit.*, Larson (1984).

¹³ *Ibid.*, Larson.

Hubungan penjelasan merujuk kepada hubungan yang memiliki satuan pendukung yang bersifat mengungkapkan kembali.¹⁴ Hubungan ini dirinci dalam beberapa jenis hubungan yaitu:

a. Hubungan penjelasan dengan pengungkapan kembali

Hubungan ini terjadi apabila informasi yang ada dalam proposisi-proposisi tumpang tindih.¹⁵ Menurut Larson (1984), tipe hubungan ini ada tiga jenis, namun yang dipakai untuk kajian ini ada dua yaitu: 1) induk- penjelasan tambahan; 2) umum-khusus. Induk-penjelasan tambahan merupakan hubungan antara dua segemen komunikasi yang salah satu segmen komunikasinya menyampaikan banyak informasi yang sudah disampaikan dalam segmen komunikasi lainnya, lalu diikuti informasi tambahan.¹⁶

1) Hubungan Induk-Penjelasan Tambahan

Data 1

Bahasa Waropen

Bahasa Indonesia

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <i>Ne orasa ghangga Sokobai yandona urarai, yangga wu innai we unggie fiigha neghogha yano.</i> | ‘Suatu hari karena perut Sokobai terasa lapar, maka diambillah sagu milik ibunya, lalu dimakannya’ |
|----|---|--|

Sumber: Mawene, Aleda. dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 144.

1.	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
INDUK	(1) <i>Ne orasa ghangga Sokobai yandona urarai</i>	‘Suatu hari karena perut Sokobai terasa lapar’
Penjelasan	(2) <i>yangga wu innai we unggie fiigha neghogha yano</i>	‘maka diambillah sagu milik ibunya, lalu dimakannya’

Contoh di atas (1) dan (2) menggambarkan bahwa sebagai individu Sokobai perlu memenuhi kebutuhan makan untuk dapat hidup. Sebagai makhluk sosial-budaya

¹⁴ *Ibid.*, Larson, hal 305.

¹⁵ *Ibid.*, Larson, hal 310.

¹⁶ *Ibid.*, Larson, hal 312.

Sokobai hidup bersama dengan manusia lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu, dalam hal ini ibunya. Proposisi (1) dan (2) menunjukkan adanya hak asasi manusia untuk hidup. Proposisi itu menunjukkan bahwa warga Waropen mempunyai hak berbahasa untuk mengemukakan gagasan menggunakan bahasanya. Warga Waropen mempunyai makanan pokok sagu untuk dapat hidup dan menjalankan kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk Tuhan. Proposisi selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Data 2:

Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
2. <i>Inai wimbaraki siwimagha yana figha weghangga yurako, kisi wima ororan rundina</i>	'Ibunya Wimbaraki mengetahui perbuatan anaknya, lalu ia memarahi anak itu.'

Sumber: Mawene, Aleda. Dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 144.

Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
2. INDUK (3) <i>Inai Wimbaraki siwimagha yana figha weghangga yurako,</i>	'Ibunya Wimbaraki mengetahui perbuatan anaknya'
Penjelasan (4) <i>Kisi wima ororan rundina.</i>	'lalu ia memarahi anak itu.'

Contoh di atas (3) dan (4) menggambarkan bahwa sebagai individu tindakan Sokobai mengambil sagu milik ibunya, bertentangan dengan kode etik yang dianut oleh warga Waropen. Karena tindakan mengambil tanpa izin pemiliknya dianggap bertentangan dengan kode etik itu lah sang ibu marah kepada anaknya. Tindakan mencuri bagi warga Waropen berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Situasi yang terjadi pada proposisi (3) dan (4) sesuai dengan prinsip universalitas hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Flowers (2000) yang berpendapat bahwa prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, pemerintah dan masyarakat mendukung hak-hak tersebut.

Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat Waropen memiliki gagasan hak berbahasa yang menggambarkan kode etik yang tercermin melalui ujaran bahasanya. Tindakan Wimbaraki yang memarahi anaknya yang mencuri sagu karena tindakan akan itu, menurutnya bertentangan dengan adat istiadat Waropen. Dengan kata lain, setiap warga Waropen memiliki tata karma yang berupa tindakan, perilaku, tegur sapa yang dibentuk dan dikembangkan oleh warga masyarakat itu. Tata krama itu terdiri dari aturan-aturan yang kalau dipatuhi akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Data 3

Bahasa Waropen

Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia

3. *Wewa yuaiwa rai womo fino Miweandei yonama ri bingga yafa. Miwandeao aghuma fio ghare katabora adowato mama kidea rawe ghghana wegga mato ranggienio.* 'Sebelum pergi bekerja Miweandei berpesan kepada istrinya untuk membakar sagu dan ikan sebagai bekal makan siang di tempat kerjanya'

Data 4

4. *Maika meinei yuna figha katbora adoigh mbobeka yuai rada menggama reghandero* 'Setelah menyiapkan makanan buat suaminya, iapun menyusul suaminya ke hutan'

Sumber: Mawene, Aleda. Dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 156.

3.	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
INDUK	(5) <i>Wewa yuaiwa rai womo fino Miweandei yonama ri bingga yafa,</i>	'Sebelum pergi bekerja Miweandei berpesan kepada istrinya,
Penjelasan	(6) <i>Miwandeao aghuma fio ghare katabora adowato mama kidea rawe ghghana wegga mato ranggienio.</i>	'Untuk membakar sagu dan ikan sebagai bekal makan siang di tempat kerjanya'
4.	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
INDUK	(7) <i>Maika meinei yuna figha katbora adoigh mbobeka,</i>	'Setelah menyiapkan makanan buat suaminya,
Penjelasan	(8) <i>yuai rada menggama reghandero</i>	'iapun menyusul suaminya ke hutan'

Contoh di atas (5) dan (6) menggambarkan bahwa perlunya setiap orang menghormati orang lain, hidup damai dan menghargai satu sama lain. Warga Waropen memiliki pengetahuan menyangkut hak berkeluarga. Dalam keluarga, suami berperan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan sandang, dan pangan. Wiweandei sebelum pergi bekerja berpesan untuk dibawakan kebutuhan makanan pokok berupa sagu dan ikan bakar. Istri menyiapkan bertugas menyiapkan makanan. Tindakan menghormati orang lain dan hidup damai merupakan kebutuhan utama bagi warga Waropen. Untaian peristiwa yang tertera pada proposisi (5) dan (6) sesuai dengan prinsip pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini mengacu kepada perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dapat menghargai satu sama lain. Prinsip ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Flowers (2000) yang berpendapat bahwa prinsip pemertabatan terhadap manusia adalah prinsip yang perlu dimiliki setiap orang.

Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat Waropen memiliki gagasan hak berbahasa yang menggambarkan upaya-upaya untuk hidup bersama saling menghormati satu sama lain, situasi itu tercermin melalui ujaran bahasa warga Waropen. Tindakan mengikuti atau taat pada perintah suami merupakan wujud saling menghormati satu manusia dengan manusia lain. Tindakan itu, sangat sesuai dengan adat istiadat Waropen. Dengan kata lain, setiap warga Waropen memiliki cara pandang yang berupa tindakan menghargai orang lain yang dibentuk dan dikembangkan oleh warga masyarakat itu.

b. Hubungan Penjelas Tanpa Pengungkapan Kembali

Hubungan penjelas tanpa pengungkapan kembali mengacu kepada bentuk hubungan proposisi yang tidak mengandung informasi yang tumpang tindih.¹⁷ Dalam hubungan ini, sebuah proposisi berperan sebagai pemberi informasi baru. Informasi baru itu berupa, perbandingan, ilustrasi, cara dan kontras.

1) Hubungan Ilustrasi

Data 5

Bahasa Waropen

Bahasa Indonesia

- | | | |
|----|--|---|
| 5. | <i>Renggawegha nana wando Kowera, ndu Lamkuri nana nabawa Waropen uriwe risagha, wimabo ndudu bawagha kisi etakugha oaina kida maya.</i> | ‘Dahulu di hulu sungai Kowera, Tamakuri daerah Waropen Atas hidup dua orang perempuan bersaudara’ |
|----|--|---|

Sumber: Mawene, Aleda. Dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 95.

5.	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
INDUK	(9) <i>Renggawegha nana wando Kowera, ndu Lamkuri nana nabawa Waropen uriwe risagha,</i>	‘Dahulu di hulu sungai Kowera, Tamakuri daerah Waropen Atas’
ilustrasi	(10) <i>wimabo ndudu bawagha kisi etakugha oaina kida maya.</i>	‘Hidup dua orang perempuan bersaudara’

Pada contoh (9) dan (10) menunjukkan hubungan proposisi yang berfungsi memaparkan suatu keadaan yang disebutkan pada proposisi pertama. Proposisi itu mengindikasikan manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya tergantung pada kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan hidup tempatnya bermukim. Dua orang perempuan

¹⁷ Ibid., Larson., hal 314.

bersaudara itu berhak hidup di tempatnya bermukim. Secara sosial mereka saling menghormati dan bekerja sama. Analisis selanjutnya:

2) Hubungan Perbandingan

Data 6

Bahasa Waropen

Bahasa Indonesia

- | | | |
|----|---|---|
| 6. | <i>Kisi kininadaigha sianggino, koku ofa kitiwa endoana bawainegha endoani etakuanigha.</i> | ‘Tubuh dan wajah mereka seperti pinang dibelah dua karena itu sulit dibedakan mana kakak dan mana adik’ |
|----|---|---|

Sumber: Mawene, Aleda. Dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 86.

6.	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
INDUK	(11) <i>Kisi kininadaigha sianggino, koku ofa kitiwa endoana</i>	‘Tubuh dan wajah mereka seperti pinang dibelah dua ‘
ilustrasi	(12) <i>kitiwa endoana bawainegha endoani etakuanigha.</i>	‘karena itu sulit dibedakan mana kakak dan mana adik’

Pada contoh (10) dan (11) menunjukkan hubungan proposisi yang berfungsi memaparkan suatu keadaan yang dibandingkan antara proposisi pertama dan propsoisi pembandingnya. Proposisi (9), (10), (11) dan (12) diidentifikasi sebagai proposisi yang menggambarkan hak kebebasan pribadi dan hak rasa aman berada dalam ruang, atau lingkungan manapun, dalam konteks ini di hutan, di kampung atau di desa. Individu yang kembar sekalipun, sebagai makhluk sosial akan hidup bersama untuk saling membantu untuk menuju hidup yang selaras. Situasi ini sesuai dengan prinsip saling ketergantungan (*interdependency*) yang dikemukakan oleh Flowers (2000). Konsepsi saling ketergantungan menggambarkan hak saling ketergantungan (*indivisibility*). Artinya setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang dan lingkungan.

2. Hubungan Logis

Hubungan logis merujuk kepada hubungan yang memiliki aspek pendukung yang berupa satuan induk yang menggambarkan adanya alasan, dasar dan sebagainya.¹⁸ Hubungan logis mengacu kepada bentuk hubungan yang memperlihatkan relasi

¹⁸ *Ibid.*, Larson., hal 305.

pendukung-INDUK non-kronologis yang dibentuk oleh gagasan sebab-AKIBAT.¹⁹ Hubungan logis yang dibahas dalam kesempatan ini hanya hubungan alasan-HASIL. Larson (1984) berpendapat bahwa hubungan alasan-HASIL diidentifikasi dengan munculnya proposisi yang mempunyai peran menjawab pertanyaan: *Mengapa hasilnya begitu?*²⁰

Bahasa Waropen

Bahasa Indonesia

7. *Kiwu ghareisinana anagha tamboi kiraisakima rumaghama weghangga, si rumaghangga nunggu wuara mbakui seawe udanina. Yoare yainawa ri sana ghaika ri warimagha.* 'Ia kembali ke rumah setelah mengambil rotan di hutan, yang dijumpainya hanya kekosongan dan kesepian belaka. Dengan hati yang pilu ia meneteskan air matanya.

Sumber: Mawene, Aleda. Dkk. Struktur Sastra Lisan Waropen. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 147.

	Bahasa Waropen	Terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia
7. alasan	(13) <i>Kiwu ghareisinana anagha tamboi kiraisakima rumaghama weghangga, si rumaghangga nunggu wuara mbakui seawe udanina.</i>	'Ia kembali ke rumah setelah mengambil rotan di hutan, yang dijumpainya hanya kekosongan dan kesepian belaka.
HASIL	(14) <i>Yoare yainawa ri sana ghaika ri warimagha.</i>	'Dengan hati yang pilu ia meneteskan air matanya.

Pada contoh (13) dan (14) menunjukkan hubungan proposisi yang berfungsi memaparkan alasan-HASIL, hubungan proposisi pertama dan proposisi kedua ada hubungan sebab akibat. Proposisi (13) dan (14) diidentifikasi sebagai proposisi yang menggambarkan hak saling ketergantungan.

Paparan analisis di atas menunjukkan bahwa warga Waropen memiliki hak bahasanya untuk digunakan. Melalui bahasa itu, mereka mengemukakan berbagai pengalaman, maupun gagasan dalam konteks kebudayaannya. Bahasa itu memiliki karakteristik yang unik. Permasalahan karakteristik pemakaian bahasa ini yang muncul sebagai isu hak bahasa, seperti kelompok masyarakat minoritas memiliki hak bahasanya untuk dipakai di ranah publik.²¹

¹⁹ Notasi analisis mengikuti cara membedah wacana yang dilakukan oleh Kumala, Sonya Ayu. 2012. "Pengungkapan Karakter Dalam Proposisi Analisis Wacana Naratif Seorang Aktifis". Depok: Tesis FIB UI.

²⁰ *Op.cit.*, Larson., hal 325.

²¹ Arzoz, Xabier. "The Nature Language Right" JEMIE journal of Linguistic Vol 6, 2007. European Centre for Minority Issue.

Ditinjau secara undang-undang, hak asasi berbahasa merujuk kepada konsepsi pemakaian suatu bahasa tertentu (*particular language*), atau adanya sekelompok kecil masyarakat yang menggunakan bahasa-bahasa tertentu (*a small group of languages*).²² Konsep ini menunjukkan secara luas, bahwa setiap masyarakat memiliki hak bahasa.

Dalam tulisan ini, digunakan konsep hak bahasa yang dikemukakan oleh De Varennes (2001) hak asasi bahasa (*language rights*) *constitutes authentic individual human rights as generally recognized in international law, such as the right to non-discrimination, to freedom of expression, to private life, and of members of a linguistics minority to use their language with other members of their community.*²³

Konsep tersebut dipahami sebagai berikut: 'hak asasi bahasa merupakan hak asasi manusia yang bersifat individu sebagaimana yang dikenal dalam hukum internasional, seperti hak untuk tidak didiskriminasi, hak mengungkapkan ekspresi, hak hidup secara khusus, dan setiap anggota masyarakat suatu bahasa berhak menggunakan bahasanya dengan anggota masyarakatnya.

Untuk penelitian ini, sangat berguna untuk membedakan dua kategori hak bahasa atau dua jenis tingkat perlindungan hukum, yaitu

- 1) Toleransi bahasa (*linguistic tolerance*) meliputi hak yang melindungi penutur bahasa minoritas dari diskriminasi dan asimilasi.
- 2) Promosi bahasa (*linguistic promotion*) mencakupi hak positif, bahasa itu digunakan sebagai bahasa utama untuk melayani publik seperti pendidikan, keterpakaian di ranah publik seperti pemerintahan, pengadilan, dan lain sebagainya), dan media publik yang dapat menjembatani penggunaan bahasa-bahasa minoritas.²⁴

Isu hak bahasa sebagai kewenangan berbahasa menjadi sangat penting. Salah satu cara memastikan hak bahasa itu penting, dengan melihat bahasa dari dua perspektif, yaitu: 1) bahasa sebagai hak, dan 2) bahasa sebagai sumber. Penjelasan dua perspektif itu sebagai berikut: hak bahasa atau hak berbahasa dapat diartikan 'kekuasaan untuk melakukan pemilihan bahasa untuk digunakan, atau kewenangan menggunakan bahasa. Dengan kata lain bahasa adalah alat untuk berkomunikasi'. Bahasa sebagai sumber merujuk kepada bahasa dapat menggambarkan nilai intrinsik. Bahasa dapat memberi gambaran nilai-nilai intrinsik karena bahasa adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Manusia hidup memerlukan bahasa, dan manusia mengalami dan mewarisi kebudayaan melalui bahasa. Dengan kata lain, bahasa adalah wahana untuk menyampaikan pengalaman, menungkapkan keyakinan, gagasan, nilai.

Indonesia memiliki konsepsi hak-hak asasi bahasa dalam hukum dasarnya yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi bahasa dicantumkan pada BAB XV, Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut: "*Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa-*

²²Op.cit., Patten and Will Kymlicka. 2003.

²³ Fernand, De Varennes. *Language Minorities and Human Rights*. (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001)., 15-25pp

²⁴ Dunbar, Robert. "Minority Language Right in International Law", 50 *International and Comparative Law Quarterly* (2001), 90-120 pp

*bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-Bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”.*²⁵

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa kepulauan Indonesia tidak hanya didiami oleh sebuah atau beberapa buah suku bangsa. Mahsun (2015) mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 659 suku bangsa (berdasarkan jumlah bahasa daerah). Suku bangsa itu secara tersebar mendiami 17 ribu pulau dalam kerangka berpikir sebagai satu kesatuan negara bangsa dengan menggunakan bahasa sebagai pondasinya.²⁶ Bahasa merupakan pondasi dapat diartikan bahasa sebagai hak dasar. Hak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai ‘milik atau kepunyaan’.²⁷

Berangkat dari makna itu hak bahasa dapat dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki manusia. Manusia yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai makhluk satu-satunya di muka bumi yang dapat berbahasa. Maka dari itu, hak bahasa tidak bersumber dari negara maupun hukum yang berlaku di suatu tempat di mana bahasa itu berada, tetapi hak yang bersumber dari Tuhan Pencipta bahasa. Sehubungan dengan hal itu, hak bahasa atau hak berbahasa yang sudah melekat dalam diri manusia layak mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dari negara dan hukum yang berlaku di negara tempat bahasa itu berada.

C. Simpulan

Hak bahasa dalam tulisan ini dipahami sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik manusia sebagai pengguna bahasa, ditinjau dari aspek penggunaan hak itu tergantung kepada manusia itu sendiri yang memiliki hak bahasa. Uraian di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu setiap bahasa berhak mendapat perlindungan hukum, setiap bahasa memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan seperti yang tertera dalam pasal 36 UUD 1945, setiap bahasa berhak dipelajari dalam ranah pendidikan di dalam masyarakat pemilik bahasa itu, setiap bahasa berhak dipertahankan oleh para pendukung bahasa tersebut, setiap bahasa berhak dipergunakan dalam berbagai ranah baik secara lisan maupun tulisan.

²⁵ Anonim. *Undang-Undang Dasar 1945. Undang_undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah Diamandemen Serta Penjelasannya*. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), hal 26, dan hal 44.

²⁶ Mahsun. “Memaknai Lahirnya Bahasa Indonesia”. Dalam *Koran Republika*, Rabu 28 Oktober 2015. (Jakarta: Mahaka Group, 2015), hal 6.

²⁷ Poerwodarminto. *W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal 339.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah Diamandemen Serta Penjelasannya*. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), hal 26, dan hal 44.
- Allan Patten and Will Kymlicka. 2003. "Introduction: Language Right and Political Theory: Contexts Issues and Approaches", in Will Kymlicka and Allan Patten (eds.), *Language Right and Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Arzoz, Xabier. 2007. "The Nature Language Right" JEMIE journal of Linguistic Vol 6, 2007. European Centre for Minority Issue.
- Denise G. Réaume. 2003. "Official-Language Right: Intrinsic Value and the Protections of Difference", in Will Kymlicka and Allan Patten (eds.), *Language Right and Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Dunbar, Robert. "Minority Language Right in International Law", 50 *International and Comparative Law Quarterly* (2001), 90-120 pp
- Fernand, De Varennes. 2001. *Language Minorities and Human Rights*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
- Flassy, Don AL, Lisidius Animung, Rackel Sawaki. 1994. *Fonologi Bahasa Waropen*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Fought, Carmen. 2006. *Language and Ethnicity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kumala, Sonya Ayu. 2012. "Pengungkapan Karakter Dalam Proposisi Analisis Wacana Naratif Seorang Aktifis". Depok: Tesis FIB UI.
- Larson, Mildred. 1984. *Penerjemahan Berdasarkan Makna: Pedoman untuk Pemaanaran Antarbahasa* Terjemahan Kencanawati Tamiran. Jakarta: Arcan.
- Lyons, John. 1999. "Sentences, Clauses, Statements, Propositions". In Peter Collins and David Lee. (ed). *The Clause in English*. Amsterdam: John Benyamins Publishing Company, 157-158pp
- Mahsun. "Memaknai Lahirnya Bahasa Indonesia". Dalam Koran Republika, Rabu 28 Oktober 2015. Jakarta: Mahaka Group.
- Mawene, Aleda, Dharmojo, Yemi Septiarti, dan Edison Saroi. 1999. *Struktur Sastra Lisan Waropen*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Patten and Will Kymlicka. 2003. "Introduction: Language Right and Political Theory: Contexts Issues and Approaches", in Will Kymlicka and Allan Patten (eds.), *Language Right and Political Theory*. Oxford: Oxford University Press. 1-51pp
- Poerwodarminto. W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renkema, Jan. 2004. *Antroduction to Discourse Studies*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Van Dijk, Teun. 1980. *Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structure in Discourse Interactions and Cognition*. New Jersey: Laurence Erlbaum Associates Publishers.
- Wiratraman, R Herlambang Perdana. 2005. "Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* Vol 20 No. 1 Januari 2005.

